

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH&Rekan”, 2001.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Alumni, 2006.

Davidsen, Soren. *et al. Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006, Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional*. Jakarta : Usindo, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Gie, Kwik Kian. *Pemberantasan Korupsi, Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta. 2001.

Hamzah, Andi. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan*. Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI, 2001.

_____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

_____. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1985.

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Acara Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Husein, Harun. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT Alumni, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta . 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta. 1979.
- _____. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung : PT Alumni, 2007.
- Prakoso, Djoko. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

_____. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*. Bandung : Alumni, 1982.

Hiariej, Eddy O.S. *Memahami Asas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah*. 2002.

INTERNET

Yuntho, Emerson “ Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi ”, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11608&cl=Kolom>, Diakses pada Jumat, 20 Agustus 2010, pukul 15:10:21 WIB

Suripto. “Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang” (*JudicialReview*) <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/risalah_sidang_Per_kara%20012.%20PUU-IV.2006.pdf>. Diakses pada Senin, 23 Agustus 2010, pukul 16:25:09 WIB.

Suara Pembaruan, “Jadikan Korupsi Extra Ordinary Crime” <<http://www.prakarsarakyat.org./artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>> . Diakses pada Rabu 25 Agustus 2010, pukul 21:20:31 WIB.

“UU KPK Terus Dipermasalahan ke Mahkamah Konstitusi” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15267&cl=Berita>, Diakses pada Jumat, 27 Agustus 2010, pukul 21:45:09 WIB.

Saleh, Abdul Rahman. “Korupsi Tergolong *Extraordinary*”
 <[http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh
 &id=129619](http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619), Diakses Sabtu, 28 Agustus 2010, pukul 20:19:08 WIB.

<http://www.majalahkonstan.com/index2.php?option=com_content,>
 Diakses pada Rabu, 1 September 2010, pukul 18:33:03 WIB.

Fatwa, A.M., “Korupsi Bukan *Extraordinary Crime* Menyesatkan.”
 < <http://www.mpr.go.id/pimpinan2/?p=18>>. Diakses pada Kamis, 2
 September 2010 pukul 10:29:45 WIB.

Tangkere, Cornelius “ Urgensi Pengadilan Tipikor”
[http://www.legalitas.org/?./problematika-dan-urgensi-pengadilan-
 tindak-pidana-korupsi](http://www.legalitas.org/?./problematika-dan-urgensi-pengadilan-tindak-pidana-korupsi), diakses pada Kamis, 2 September 2010, pukul
 16:22:15 WIB.

Saleh, Abdul Rahman
[http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/default.asp?Berita=Pinyuh
 &id](http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/default.asp?Berita=Pinyuh&id), Diakses Kamis, 2 September 2010, pukul 20:19:08 WIB.

Adji, Indriyanto Seno. “ Kalau Tidak Diminta, Saya Tidak Akan Mau
 Jadi Pengacara Puteh”.
 <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15775&cl=Berita>.
 Diakses pada Jumat, 3 September 2010, pukul 16:54:37 WIB.

Mengadili Eksistensi Pengadilan Tipikor”
<http://www.legalitas.org/?q=node/44>, diakses pada Kamis, 9
 September 2010, pukul 15:20:34 WIB

<http://www.legalitas.org/inclphp/buka.php?d+lain+1&f=statuta%20Roma.htm>
 , diakses pada Jumat, 17 September 2010, pukul 19:08:30 WIB.

<<http://www.antara.co.id/arc/2008/5/1/meratifikasi-statuta-roma/>>,
 diakses pada Jumat, 17 september 2010, pukul 19:15:34 WIB.

<http://ucupneptune.blogspot.com/2008/01/international-criminal-court-icc.html>, Jumat, 17 september 2010, pukul 19:44:24 WIB.

Analisis Undang-undang No.30 tahun 2002 Tentang KPK
<http://sahabatandalas.blogspot.com/2008/10/ini-merupakan-analisis-sederhana-yang.html>

Diakses, 30 September 2010, pukul 10:23:52 WIB

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD 1945

_____. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN. 3209

_____. *Undang-Undang Kejaksaan RI*. UU No. 16 Tahun 2004. LN. No. 67 Tahun 2005, TLN No. 4401.

_____. *Undang-Undang Ketentuan Pokok Kejaksaan RI*. UU No. 15 Tahun 1961. LN No. 254 Tahun 1961.

_____. *Undang –Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

_____. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

_____. *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. UU No, 26 Tahun 2000. LN No. 191 Tahun 2000, TLN No. 3911.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.*

3. JURNAL / MAKALAH

Loebby Loqman. “ Optimalisasi Undang-Undang Terhadap Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Reformasi Ekonomi. Vol. 7 No. 1 Januari-Juni . (2006).*

Masduki, Teten dan Danang Widyoko. “ Menunggu Gebrakan KPK”. *Jentera Jurnal Hukum, Edisi 8 Tahun III Maret (2005)*